



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS PUTUSAN PTUN PEKANBARU NOMOR 39/G/2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SEPTI PIYOLA
NIM. 11724202875

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1442 H/ 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 19/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasaah”**

yang ditulis oleh:

Nama : Septi Piyola

NIM : 11724202875

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Maret 2021

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M. Ag.

NIK. 197505212006041003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, yang ditulis oleh :

Nama : Septi Piyola
NIM : 11724202875
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 April 2021
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
Yamsuddin Muir, Lc, MA

Penguji I
Ahmad Adri Rifa'i, M. Ag

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M. Ag



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Septi Piyola (2021) : Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa dalam pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam pasal 53 mengenai pemberhentian perangkat desa, Namun dalam praktiknya masih ada pemberhentian perangkat desa yang diberhentikan begitu saja tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut. Hal ini dapat ditemukan dalam surat putusan PTUN Pekanbaru tentang pemberhentian perangkat yang dilakukan oleh kepala desa Sungai Liti tanpa sebab dan alasan yang terkait dalam pemberhentian perangkat desa,

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi kasus dan duduk perkara kasus PBR tergugat kepala desa Sungai liti Kec. Kampar Kiri, bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap putusan PTUN Pekanbaru No 39/G/2018 tentang pemberhentian perangkat desa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Setelah disimpulkan dan tersusun dalam kerangka yang jelas, lalu dianalisa dengan menggunakan metode *Conten Analisis*.

Penelitian ini memberikan hasil analisa, pertama posisi kasus penggugat diberhentikan dari jabatannya tanpa sebab dan alasan sehingga menimbulkan rasa tidak terima sehingga membuat pengajuan gugatan. Kedua Penilaian hakim dalam Surat Keputusan nomor Kpts/140/VI/2018/10 dalam putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Liti tentang pemberhentian perangkat desa bahwa kepala desa telah melanggar asas bertindak cermat dan asas keadilan atau kewajaran dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, kedua bahwa sikap Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keputusan bertentangan dengan pandangan siyasah syari'ah Karena melanggar 2 prinsip yaitu prinsip derajat kemuliaan manusia dan prinsip keadilan anti diskriminasi.

Kata Kunci: Putusan-PTUN- Pemberhentian-Perangkat Desa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita yang penuh kebodohan kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis hanturkan kepada kedua Orang tua dan keluarga tercinta saya, ayahanda AFRIZAL dan Ibunda AFNIWATI yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan saya , sekaligus yang selalu memberikan dukungan moril dan spiritual kepada saya, semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam keadaan sehat, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT, serta kakak-kakak dan abang-abang saya tercinta NOVA DIA, ROZI GUSPERI, NANDA MELIA, KELMI SAPUTRA, dan sekaligus seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masukan, kritikan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Rahman Alwi, M.Ag sebagai ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus Pembimbing Akademis yang telah banyak memberi saran, masukan, bantuan, dan semangat selama masa perkuliahan, dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan, dan telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini, dan selalu memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Bapak/ Ibu Dosen serta pengelola perpustakaan UIN SUSKA Riau atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai referensi penulis.
5. Terimakasih kepada Bapak Fauzi Risky SH. MH yang telah memberikan saran-saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta memberi motivasi kepada penulis untuk selalu semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih kepada Muhammad Ikhwan Hasibuan yang selalu membantu penulis dalam masalah yang berhubungan dengan perkuliahan, memberikan semangat kepada penulis, dan yang selalu berkata kepada penulis “kamu pasti bisa, dan jangan pernah menyerah, ingat ada orang tua dan keluarga yang harus kamu bahagiakan”. Semoga niat baik kita dikabulkan oleh Allah SWT. Serta terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) baik senior maupun junior yang telah memberikan bantuan dan arahan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis hanya berdo'a semoga apa-apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal yang sangat berguna dan akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. *Amin*

Pekanbaru, 16 Maret 2021
Penulis

SEPTI PIYOLA
NIM: 11724202875

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PTUN DAN PTUN PEKANBARU	
A. PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)	13
1. Pembentukan PTUN	13
2. Fungsi PTUN	15
3. Asas- Asas Dalam PTUN	17
4. Kewenangan dan Susunan Peradilan Tata Usaha Negara	17
5. Subjek dan Objek PTUN	18
6. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	25
7. Putusan	28
BAB III PENGERTIAN DESA, PERANGKAT DESA, PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014	
A. Pengertian Desa	32
B. Perangkat Desa	40
C. Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	46
D. Perundang-Undangan	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (PTUN)	
Pekanbaru	57
1. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.....	57
2. Struktur Organisasi PTUN Pekanbaru	59
3. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pengadilan Tata Usaha Negara	60
B. Posisi Kasus dan Duduk Perkara	74
C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Putusan Nomor 39/G/2018 PTUN. PBR	76
D. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan PTUN Pekanbaru No 39/G/2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagaimana konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.¹

Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.²

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah kecamatan, yang telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya.³ Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama, batas,

¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet. Ke-3, h. 45

² Wijaya Haw, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. Ke-1, h. 1

³ C.S.T. Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 2004), h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan, hak, dan kewajiban Desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan daerah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan, dan penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Dalam Negeri.⁴

Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa. Hal itu membuat kepala desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa bahwa kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.⁵ Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Untuk menjalankan pemerintahan di Desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam melaksanakan kewajiban, tugas, dan fungsinya kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-

⁴ *Ibid.*, h. 59

⁵ <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pekon> Diakses pada 28 Agustus 2020, Pukul 14.20 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an yaitu Ulil Amri.⁶ Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang – orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa/4:59).⁷

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Salah satu sengketa yang sering menimbulkan gugatan atau tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan gejalanya surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala Desa yaitu tentang pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang dan Permendagri, Tetapi masih ada dalam Undang-Undang ini yang dijalankan ataupun tidak satupun

⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 105

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), h. 87

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang-Undang ini yang sesuai dengan pemberhentiannya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 53 mengenai pemberhentian perangkat desa, yang mana dalam putusan PTUN ini dapat dilihat pemberhentian perangkat yang dilakukan oleh kepala desa tanpa ada alasan yang terkait dalam pemberhentian perangkat desa, yang bisa dikatakan bahwa perangkat desa diberhentikan tanpa adanya satu pun pelanggaran yang mereka lakukan. Dalam surat keputusan yang dikeluarkan itu masih ada alasan pemberhentian yang tidak sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa kepala Desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. Mengenai pemberhentian perangkat Desa dijelaskan dalam pasal 53 yang dikatakan bahwa perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Adapun perangkat Desa yang di berhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat 1 huruf c karena :

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Berhalangan tetap;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa.⁹

Dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala Desa yaitu tentang pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang dan Permendagri. Pemberhentian perangkat Desa yang

⁹ Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada surat keputusan kepala Desa yang terdapat pada pasal 53 ayat 3 yang menyebutkan bahwa perangkat Desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Artinya bahwa kepala Desa tidak berhak melakukan pemberhentian perangkat Desa dengan tanpa alasan yang jelas.

Salah satu alasan yang disebutkan diatas sebagai dasar pemberhentian perangkat Desa adalah perangkat Desa melanggar larangan sebagai perangkat Desa, Larangan sebagai perangkat Desa disebutkan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang atau barang, jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang.¹⁰

¹⁰ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberhentian perangkat Desa tidak hanya dilakukan pada pemberhentian permanen sebagai perangkat Desa, tetapi juga dapat diberhentikan yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 6 permendagri No 83 Tahun 2015 yaitu pertama perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, kedua pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 karena:

1. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. Ditetapkan sebagai terdakwa;
3. Tertangkap tangan dan ditahan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) dikembalikan kepada jabatan semula. Pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian telah tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan tidak disadari dengan adanya kepentingan politik kepala Desa dan penilaian pribadi, dengan demikian akan dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh semangat kesatuan dan persaudaraan.

Dalam penetapan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pada pasal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/ Kota selambat-lambatnya satu tahun setelah peraturan itu ditetapkan.¹¹

Berdasarkan gejala di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PTUN PEKANBARU NO 39/G/2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH ”** dengan tujuan menganalisis studi kasus PBR tergugat kepala desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau tentang pemberhentian perangkat desa, apakah pemberhentian perangkat desa tersebut sudah terlaksana sesuai dengan pelaksanaan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah mengambil batasan yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada Putusan PTUN Pekanbaru No 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perspektif Fiqih Siyasaah.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang diatas, Maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi dan duduk perkara studi kasus PBR tergugat kepala desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Putusan No 39/G/2018 PTUN.PBR?
3. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Putusan PTUN Pekanbaru No 39/G/2018 tentang pemberhentian perangkat desa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana posisi dan duduk perkara studi kasus PBR tergugat kepala desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Putusan No 39/G/2018 PTUN.PBR?
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Putusan PTUN Pekanbaru No 39/G/2018 tentang pemberhentian perangkat desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas- asas dalam ilmu hukum.¹³ Mengacu pada norma- norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan- putusan pengadilan serta norma- norma hukum yang ada dalam masyarakat.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018/PTUN.PBR mengenai pelaksanaan pemberhentian perangkat desa.

¹² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet, ke-1, h. 12

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, peraturan dasar, Peraturan perundang- undangan, keputusan menteri dan peraturan yang setaraf, bahan – bahan hukum yang belum dikodifikasi hal ini bisa ditemukan di dalam hukum islam atau hukum adat, dan lain sebagainya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang- undang hasil- hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya,

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan studi

¹⁴ Ibid., h. 23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastakaan. Dalam penelitian kepastakaan ini penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terkait langsung dengan penelitian yang penulis teliti. Bahan-bahan primer dan sekunder ini akan dikumpulkan dan dikelola secara sistematis, yang berkaitan sesuai objek penelitian yang bersumber dari buku-buku.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Conten Analisis*, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹⁵ Noeng Muhaddjar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1991).h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : PTUN DAN PTUN PEKANBARU

Pada bab ini berisi data penelitian yang memaparkan tentang pembentukan PTUN, fungsi PTUN, asas- asas dalam PTUN, kewenangan dan susunan PTUN, subjek dan objek PTUN, penyelesaian sengketa TUN, putusan PTUN.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu Pengertian Desa, Perangkat Desa, Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2014.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang posisi dan duduk perkara studi kasus PBR tergugat kepala desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pertimbangan Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Putusan No 39/G/2018 PTUN.PBR, dan pandangan Fiqih Siyasah terhadap Putusan PTUN Pekanbaru No 39/G/2018 tentang pemberhentian perangkat desa

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PTUN DAN PTUN PEKANBARU

A. PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)

1. Pembentukan PTUN

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh empat lingkungan peradilan yaitu:

- a. Lingkungan Peradilan Umum;
- b. Lingkungan Peradilan Agama;
- c. Lingkungan Peradilan Militer;
- d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁶

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang di tandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada 29 Desember 1986, dalam konsideran “Menimbang” undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha Negara dengan para warga masyarakat. Dengan demikian lahirnya PERATUN juga menjadi bukti bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia (HAM).

¹⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara perlu ada perubahan pengaturan, utamanya mengenai hukum acaranya, karena Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, karena itu diundangkanlah Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Perubahan yang sangat mendasar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dengan dihilangkannya wewenang pemerintah ic. Departmen kehakiman sebagai pembina organisasi, administrasi, dan keuangan pengawasan umum bagi hakim PERATUN, yang kemudian semuanya beralih ke Mahkamah Agung, hal ini diharapkan dapat meningkatkan independensi lembaga PERATUN.¹⁷

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.¹⁸ Selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara.¹⁹ Dari pengertian diatas dapat kita ketahui

¹⁷ *Ibid.*, h. 271

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tempat untuk mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat, karena sebagai tempat untuk mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, ketertiban, dan keadilan maka bagi mereka (orang) yang bekerja di Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus orang-orang yang baik, arif, dan bijaksana, jangan sampai orang yang bekerja di tempat tersebut orang-orang yang tidak baik, tidak arif, dan tidak bijaksana.²⁰ Adapun syarat-syarat untuk dapat disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu instansi atau badan yang netral dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan;
- b. Terdapatnya suatu peristiwa hukum konkrit yang memerlukan kepastian hukum;
- c. Terdapatnya suatu peraturan hukum yang abstrak dan mengikat secara umum;
- d. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
- e. Adanya hukum formil.²¹

2. Fungsi PTUN

PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.²² Inti dari fungsi PTUN

²⁰ Nur Yanto, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h. 2

²¹ Siswanto Sumarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah lembaga yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga masyarakat dalam bidang hukum publik. Adapun prinsip khusus PTUN yaitu :

- a. Prinsip pembuktian bebas (*vrij bewijs*) hakim bebas membebaskan pembuktian kepada para pihak yang dianggap kompeten menghadirkan bukti yang dibutuhkan;
- b. Prinsip keaktifan hakim (*actieve rechter*);
- c. Prinsip *erga omnes* dalam sengketa tata usaha negara maksudnya adalah bahwa pejabat pemerintahan dalam membuat suatu keputusan sudah mempertimbangkan semua kepentingan masyarakat (kepentingan umum) sehingga walaupun keputusan bersifat konkrit, individual, dan final, untuk itu apabila keputusan ini di permasalahan di PTUN maka putusan PTUN nantinya bersifat *erga omnes* berlaku untuk semua orang.

Di lain pihak, karena PTUN menjalankan fungsi yudisial murni maka terikat dengan prinsip-prinsip peradilan terutama prinsip pengujian (*rechtmatigheid*) dan larangan menguji (*doelmatigheid*). Dalam konteks ini hakim PTUN tidak mengkonsentrasikan penilaiannya terhadap isi atau maksud dari keputusan tetapi yang menjadi fokus penilaian adalah bagaimana proses pengambilan keputusan.

²² Pasal 49 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas- Asas Dalam PTUN²³

Adapun asas- asas dalam PTUN yaitu sebagai berikut:

- a. Praduga rechmatig, setiap tindakan pemerintah selalu dianggap sah sampai ada pembatalannya;
- b. Pembuktian bebas, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, bebas menentukan beban pembuktian, dan sahnya pembuktian minimal dua alat bukti;
- c. Asas keaktifan hakim, untuk mengimbangi kedudukan para pihak tergugat dan penggugat;
- d. Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, sengketa TUN adalah sengketa hukum publik berarti putusan berlaku terhadap siapa saja.

4. Kewenangan dan Susunan Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”.²⁴ Dengan demikian maka wewenang PTUN dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Memeriksa;
- b. Memutus;
- c. Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

Adapun ketiga kewenangan ini merupakan kekuasaan absolut (Kompetensi Absolut) dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, tidak semua Sengketa Tata Usaha Negara menjadi tugas

²³ Zainal Asikin. *Op.Cit*, h. 274

²⁴ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan wewenang PTUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, karena dari ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat diketahui bahwa PTUN tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan.²⁵

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan dalam tiga tingkatan peradilan yaitu:

- a. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yang berfungsi untuk memeriksa ditingkat kasasi perkara yang telah diputus oleh pengadilan ditingkat bawahnya.
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
- c. Pengadilan Tata Usaha Negara pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.²⁶

5. Subjek dan Objek PTUN

Yang menjadi subjek dalam PTUN adalah pihak penggugat dan tergugat. Penggugat dalam PTUN adalah :

- a. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara;

²⁵ Zainal Asikin, *Op.Cit*, h. 278

²⁶ *Ibid.*, .h. 279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara (KTUN).

Jadi pada pemeriksaan di sidang pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha Negara tidak di mungkinkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertindak sebagai penggugat, namun terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di mungkinkan bertindak sebagai penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara khusus tentang sertifikat tanah, karena alas hak dari gugatan adalah hak keperdataan dari BUMN tersebut. Dalam hal ini, BUMN tersebut tidak bertindak sebagai Badan Tata Usaha Negara, tetapi sebagai Badan Hukum Perdata.

Sedangkan pihak tergugat adalah jabatan yang ada pada Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN berdasarkan wewenang dari Badan TUN itu atau wewenang yang di limpahkan kepadanya. Hal ini mengandung arti bahwa bukanlah orangnya secara pribadi yang di gugat tetapi jabatan yang melekat kepada orang tersebut. Misalnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bupati Buleleng, dan lain-lain, sehingga tidak akan menjadi masalah ketika terjadi pergantian orang pada jabatan tersebut.

Sebagai jabatan TUN yang memiliki kewenangan pemerintahan, sehingga dapat menjadi pihak tergugat dalam Sengketa TUN dapat dikelompokkan menjadi:²⁷

²⁷ *Ibid.*, h. 273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Instansi resmi pemerintah yang berada di bawah Presiden sebagai Eksekutif;
- b. Instansi- instansi dalam lingkungan kekuasaan Negara di luar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas- tugas pemerintahan;
- c. Badan-badan hukum privat yang di dirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas- tugas pemerintahan;
- d. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pemerintahan dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
- e. Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.²⁸

Untuk dapat menentukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menjadi tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara perlu lebih dahulu harus diperhatikan jenis dari wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut pada waktu mengeluarkan KTUN, adapun jenis wewenang yang di maksud adalah:

- a. Atribusi adalah wewenang yang langsung di berikan atau langsung di tentukan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Misalnya wewenang yang diberikan kepada Presiden RI untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004.

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suwoto Mulyosudarmo ciri-ciri dari atribusi adalah sebagai berikut.²⁹

- 1) Pembentukan kekuasaan secara atribusi melahirkan kekuasaan baru;
 - 2) Pembentukan kekuasaan secara atribusi harus dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- b. Mandat adalah wewenang yang di berikan kepada mandataris (penerima mandat) dari mandans (pemberi mandat) melksanakan wewenang untuk dan atas nama mandans. Pada wewenang yang diberikan dengan mandat, mandataris tidak sampai diberikan tanggung jawab dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh mandans. Tetapi mandataris hanya sekedar diberikan wewenang untuk dan dan atas nama mandans mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian tidak sampai ada pengalihan wewenang dari mandans kepada mandataris dan karenanya tanggung jawab atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara masih tetap pada mandans.

Karena mandataris hanya sekedar diberikan wewenang untuk dan atas nama mandans mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara saja, maka setiap waktu mandans masih mempunyai wewenang untuk

²⁹ R. Wiyono, Op. Cit, h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan Keputusan Hukum Tata Negara tanpa mencabut terlebih dahulu mandat yang telah diberikan kepada mandataris.

Adapun ciri-ciri mandat menurut Suwoto Mulyosudarmo yaitu:³⁰

- 1) Pemberian kuasa hanya dapat diberikan oleh badan yang berwenang, yaitu badan yang memperoleh kekuasaan secara atribusi dan oleh pemegang delegasi;
- 2) Pemberian kuasa tidak membawa konsekuensi bagi penerima kuasa untuk bertanggung jawab kepada pihak ketiga, namun dapat diwajibkan memberikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan kepada pemberi kuasa. Tanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kaitannya dengan tugas mandataris tetap berada pada pemberi kuasa (mandans);
- 3) Konsekuensi teknis administratifnya adalah bahwa seorang pemegang kuasa harus bertindak atas nama pemberi kuasa, sedangkan seorang pemegang delegasi dan pemegang atribusi dapat bertindak mandiri;
- 4) Penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa kepada pihak ketiga hanya atas izin dari pemberi kuasa. Jika secara tegas pada pemberian submandat diperlukan karena pelimpahan kuasa, pada hakikatnya hanya sekedar pemberian hak untuk melakukan sebagian atau seluruh kekuasaan tanpa mengalihkan tanggung jawab.

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Delegasi adalah wewenang yang di berikan dengan penyerahan wewenang dari delegans (pemberi delegasi) kepada delegataris (penerima delegasi). Dalam hal ini, delegataris telah di berikan tanggung jawab untuk mengeluarkan KTUN untuk dan atas nama delegataris sendiri, bukan untuk dan atas nama delegans, karena telah terjadi penyerahan wewenang dari delegans kepada delegataris. Delegasi baru mempunyai wewenang kembali untuk mengeluarkan KTUN setelah mencabut terlebih dahulu pemberian delegasi kepada delegataris.

Adapun ciri-ciri delegari menurut Suwoto Mulyosudarmo adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Pendelegasian harus dilakukan oleh badan yang berwenang;
- 2) Pendelegasian menyebabkan hilangnya wewenang bagi delegans dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- 3) Delegataris harus bertindak dan atas nama sendiri dan oleh karena itu seorang delegataris bertanggung jawab secara eksternal terhadap segala pelaksanaan kekuasaan yang timbul dari pendelegasian kekuasaan itu;
- 4) Subdelegasi baru dapat dilakukan, tetapi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan delegans.³²

Selanjutnya objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keputusan Tata Usaha Negara

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Badan atau Pejabat TUN artinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Badan diatas melakukan tindakan dengan mengeluarkan suatu keputusan atau penetapan tertulis. Keputusan Badan TUN tersebut bersifat konkret diartikan sebagai objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan. Keputusan itu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, baik berupa menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (*declaratoir*) , menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*constitutief*), menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, dan menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru.

Secara yuridis bahwa syarat-syarat untuk sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil yaitu sebagai berikut:³³

³³ *Ibid.*, h. 277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Syarat formil

- 1) Harus memenuhi prosedur yang ditentukan yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan cara dibuatnya keputusan itu;
- 2) Bentuknya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;
- 3) Jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Syarat materil
- 5) Keputusan harus dibuat oleh alat Negara (organ) yang berwenang;
- 6) Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis;
- 7) Keputusan harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;
- 8) Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

6. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Dengan kata lain Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah tidaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Tolak ukur pangkal sengketa yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan perbuatan penetapan administrasi Negara.³⁵

Adapun penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa:

- a. Pihak penggugat wajib atau harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN yang disengketakan tersebut diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara. Upaya administratif dimaksudkan sebagai kontrol atau pengawasan yang bersifat intern dan refresif dilingkungan Tata Usaha Negara terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Upaya administratif itu berupa “Keberatan dan banding administratif”. Upaya administratif berupa keberatan ke instansi terkait, kemudian banding administrasi diajukan ke instansi atasannya misalnya panitia penyelesaian sengketa yang ada, MPP (Majelis Pertimbangan Pajak), BPK (Badan Pemeriksa Kepegawaian), P4D

³⁴ *Ibid.* h.271

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993). h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Panitia Penyelesaian Kerselisihan Kerburuhan Daerah), Biro-biro hukum instansi MPP (Majelis Pertimbangan Pajak).

- b. Pihak penggugat dapat langsung menempuh upaya peradilan jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN yang disengketakan tersebut tidak diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara.³⁶

Upaya peradilan dapat dilakukan melalui Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat, tergantung kepada kepentingan penggugat.

- a. Acara pemeriksaan biasa yaitu pengajuan gugatan, pemeriksaan persiapan, pemeriksaan pokok sengketa, tahap pengajuan replik, tahap pengajuan duplik, tahap pengajuan alat- alat bukti, tahap pengajuan kesimpulan, pada tahap pengajuan kesimpulan, tahap penjatuhan putusan;
- b. Acara pemeriksaan cepat dimana dalam surat gugat harus sudah dimuat atau disebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar dari penggugat untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan sengketa TUN dipercepat.

Disamping diperiksa oleh Hakim Tunggal, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat,

³⁶ Zainal Asikin, *Op. Cit*, h. 281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan waktu siding tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing- masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari. Keuntungan dari pemeriksaan acara cepat adalah putusannya dapat lebih cepat, namun kelemahannya bagi pihak ketiga tidak dapat masuk dalam proses persidangan dan resiko tentang fakta tidak sekuat dan meyakinkan seperti dalam acara biasa.

7. Putusan

Putusan PTUN (pengadilan tata usaha negara) yang diambil setelah kedua belah pihak telah mengemukakan kesimpulannya masing-masing. Majelis hakim memiliki wewenang bermusyawarah untuk mempertimbangkan segala sesuatu agar mendapatkan putusan untuk sengketa tersebut.³⁷ Menurut sifatnya, amar atau diktum putusan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Putusan condemnator yaitu yang amarnya berbunyi penghukuman atau menghukum;
- b. Putusan Konstitutif yaitu yang amarnya menimbulkan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum baru.³⁸

Seperti halnya dalam Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Tata Usaha Negara juga dikenal adanya jenis putusan yaitu putusan yang bukan putusan akhir, dan putusan akhir.

³⁷A. Siti Soetamin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 49

³⁸H. Zainal Asikin, *Op.Cit*, h. 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Putusan Yang bukan putusan akhir

Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai. Tujuan dari dijatuhkannya putusan yang bukan putusan akhir adalah untuk memungkinkan atau mempermudah pelanjutan pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara disidang pengadilan.³⁹

Terdapat beberapa putusan yang bukan putusan akhir yang perlu mendapat perhatian yaitu:⁴⁰

- a. Putusan hakim yang dijatuhkan karena jabatannya yang menyatakan tidak mempunyai kewenangan absolut;
- b. Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat (Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- c. Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat (Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Ketiga putusan hakim tersebut dijatuhkan sebelum pokok perkara diperiksa. Jika Tergugat keberatan terhadap ketiga putusan Hakim yang dimaksud, maka dengan sendirinya langsung dapat diajukan permohonan pemeriksaan banding, yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

³⁹ R. Wiyono, *Op. Cit*, h. 188

⁴⁰ *Ibid.*, h. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setelah pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (7), dapat diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa antara lain:

1) Gugatan ditolak⁴¹

Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dinyatakan batal atau sah. Dengan demikian, putusan yang berupa gugatan ditolak baru dijatuhkan oleh Hakim setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

2) Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha yang dinyatakan batal atau tidak sah.

3) Gugatan tidak diterima

Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak

⁴¹ Ibid.

dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dikemukakan pada putusan tersebut sebenarnya bersifat deklaratif, yang tidak membawa perubahan apa-apa dalam hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Tergugat.

4) Gugatan gugur

Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan Hakim karena Penggugat tidak pernah hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau Penggugat telah meninggal dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PENGERTIAN DESA, PERANGKAT DESA, PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014

A. Pengertian Desa

Kata desa berasal dari bahasa India yakni *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.⁴² Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³ Adapun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁴

⁴² Sadu Wastiono, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2007), cet. Ke-1, h. 7

⁴³ C. S. T Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. Ke-3, h. 58

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat- syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat- syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.⁴⁵

Desa memiliki wewenang yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :⁴⁶

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul Desa;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten / Kota;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan Kepada Desa.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 54

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kewenangan yang tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal – usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
2. Melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
4. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
5. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;
6. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa;
7. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa;
8. Mendapatkan sumber pendapatan.⁴⁷

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat Desa. Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi di sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁴⁸ Hal itu membuat Kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru, 2018),h. 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semata – mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Adapun orang yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia (warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dan memenuhi syarat- syarat untuk dipilih) yang⁴⁹

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti G-30-S/PKI dan atau kegiatan- kegiatan organisasi terlarang lainnya;
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
6. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus- putus, kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;

⁴⁹ C. S. T Kansil, Christine, *Op. Cit*, h. 61-62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sekurang- kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi- tingginya 60 (enam puluh) tahun;
9. Sehat jasmani dan rohani;
10. Sekurang- kurangnya berijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau yang berpendidikan/ berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:⁵⁰

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
4. Menetapkan peraturan Desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

⁵⁰ Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Jika ada wewenang tentu pula ada kewajiban sebagai Kepala Desa antara lain yaitu:⁵¹

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Menaati dan menegakan peraturan perundang – undangan;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
8. Mengelola keuangan dan aset Desa;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
10. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

⁵¹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
13. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
14. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan larangan Kepala Desa yaitu:⁵²

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

⁵² Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan;

10. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah;
11. Melanggar sumpah / janji jabatan dan;
12. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya kepala desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena:

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri;
3. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru;
4. Tidak lagi memenuhi syarat pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
5. Melanggar sumpah/ jabatan;
6. Melanggar larangan bagi Kepala Desa;
7. Sebab- sebab lain.⁵³

Adapun larangan bagi kepala desa yaitu kepala desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat desa.⁵⁴

⁵³ H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 40

⁵⁴ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan salah satu organ dari pemerintahan Desa, selain Kepala Desa. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 disebutkan bahwa perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.⁵⁵ Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati / Walikota.

Perangkat Desa terdiri atas:

1. Sekretaris Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan;
3. Pelaksana Teknis.⁵⁶

Adapun tugas dari Perangkat Desa tersebut yaitu:

1. Sekretaris Desa

Dalam Pasal 62 menyebutkan bahwa sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan

⁵⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

⁵⁶ Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang *Desa* pasal 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekretariat Desa paling banyak terdiri dari 3 bidang urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yaitu:⁵⁷

Pasal 3

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- (2) Sekretariat desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:⁵⁸
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

⁵⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

⁵⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.⁵⁹
2. Pelaksana kewilayahan⁶⁰

Pelaksana kewilayahan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yaitu:

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksanaan kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala kewilayahan / kepala dusun memiliki fungsi:⁶¹
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Pelaksana teknis⁶²

Pelaksana teknis dijelaskan dalam Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yaitu:

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan

⁶² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.⁶³

C. Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pengangkatan adalah suatu proses atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya). Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan – jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai, dan mempunyai prestasi baik dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,

⁶³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.⁶⁴ Pengangkatan adalah suatu proses atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya).

Sedangkan Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintah Desa dibawah naungan Kepala Desa. Adapun Perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR) / Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan / Kepala Dusun (KADUS) yang ada disetiap pemerintahan Desa.

Perangkat Desa pada dasarnya adalah para pengabdikan untuk melayani masyarakat Desa dalam hal urusan pemerintahan dan sosial, dan membangun ekonomi perdesaan. Jasa para Perangkat Desa sangat sungguh luar biasa dalam hal tersebut, dengan jasa tersebut mereka diberikan hak sosial untuk penggunaan tanah desa sebagai wujud apresiasi masyarakat Desa terhadapnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu:⁶⁵

Pasal 2 yaitu mengenai persyaratan pengangkatan)

- (1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

⁶⁴ Soeno S. H., *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : libeti, 2005).h. 146

⁶⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.⁶⁶
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;

⁶⁶ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dari Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 4 mengenai mekanisme pengangkatan⁶⁷

- (1) Pengangkatan perangkat desa di laksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dn minimal seorang anggota;
 - b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;

⁶⁷ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan atau penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan kepala desa.

Adapun dalam pemberhentian perangkat desa terdapat dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yaitu:⁶⁸

Pasal 5

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.

⁶⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalam pasal 6 mengenai pemberhentian sementara yaitu:⁶⁹

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau *incraht* dikembalikan kepada jabatan semula.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkatan Perangkat Desa antara lain:

- a. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI;
- b. Perlu adanya pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun;
- c. Perlu adanya yang melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah dusun;
- d. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;
- e. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;

⁶⁹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;⁷⁰
- g. Melaksanakan peraturan Desa, peraturan, dan keputusan Kepala Desa;
- h. Membantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Desa dan wilayah dusun;
- i. Memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan Perangkat Desa dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa dibentuk karena untuk mewujudkan Desa yang berkualitas dengan adanya pelayanan administrasi.

D. Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang wet in materiele zin melukiskan pengertian perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:⁷¹

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht*, *written law*).
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).

⁷⁰<http://Wongkarangtengah.Blogspot.Co.Id/2016/11/Perangkat-Desa-Sebagai-Ujung-Tombak.Html> (Diakses pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 10.30 WIB).

⁷¹Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), cet. Ke-1. H. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁷²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3. Peraturan pemerintah;
4. Peraturan presiden;
5. Peraturan daerah.

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain:

⁷² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat membentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
5. Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.⁷³

⁷³ *Ibid.*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh pemerintah nasional pada dasarnya mencakup mengenai pemberhentian perangkat desa, tepatnya yang tercantum dalam pasal 53 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang berbunyi:

- (1) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/ Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis yang penulis lakukan dan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat adalah seorang perangkat desa yang diberhentikan secara paksa tanpa sebab dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa.
2. Penilaian hakim terhadap Surat Keputusan nomor Kpts/140/VI/2018/10 dalam putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Liti tentang pemberhentian perangkat desa bahwa kepala desa telah melanggar asas bertindak cermat dan asas keadilan atau kewajaran dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
3. Menurut pandangan fiqih siyasah bahwa sikap Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keputusan bertentangan dengan pandangan siyasah syari'ah Karena melanggar 2 prinsip yaitu prinsip derajat kemuliaan manusia dan prinsip keadilan anti diskriminasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa dalam mengeluarkan suatu keputusan yang ditujukan langsung kepada bawahannya agar dapat memperhatikan dengan cermat isi dari keputusan tersebut sehingga tidak terdapat cacat materil didalamnya.
2. Diharapkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sebuah keputusan harus lebih transparan dan terbuka serta mencantumkan alasan dan sebab agar tidak terjadi kesalahan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Christine, C.S.T. Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A, 2003, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Haw, Wijaya, 2005, *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, Mahendra, dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Muhaddjar, Noeng, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pratiwi, Cekli Setya, Dkk, 2016, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*, Jakarta: Leiden.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1993, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rojak, Jeje Abdul, 2014, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Rosidin, Utang, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- S. H, Soeno, 2005, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: libeti.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Samah, Abu, 2018, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, Pekanbaru.
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta: Rajawali.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Soetamin, A. Siti, 2009, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama.

Sukardja, Ahmad, 2014, *Hukum Tata negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumarno, Siswanto, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga.

Wastiono, Sadu, Irwan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media.

Widjaja, H.A.W, 2002, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo.

Wiyono, R, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yanto, Nur, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Al-Qur'an dan Terjemahan

Dapartemen Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma exagrafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang *Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa*
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Internet

<https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pekon> Diakses pada 28 Agustus 2020, Pukul 14.20 WIB

<http://PTUN.Pekanbaru.ac.id> Diakses pada hari sabtu tanggal 21 November 202, pukul 14.43 WIB

Saiful Achyar, *Pemberian Uang Pesangon Menurut Hukum Islam: (Studi Terhadap Korban PHK. Di PT. Mitra Saruta Indonesia Wringin Anom gresik)*, vol. 3 Nomor. 2 (Desember 2013), h. 689
<http://maliyah.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/11/10>, (Diakses pada 18 Agustus 2021 pukul 11.25 wib).

<Http://Wongkarangtengah.Blogspot.Co.Id/2016/11/Perangkat-Desa-Sebagai-Ujung-Tombak.Html> (Diakses pada hari selasa tanggal 22 desember 2020 pukul 10.30 WIB).

Lain- lainnya

Data Dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, yang ditulis oleh :

Nama : Septi Piyola
NIM : 11724202875
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
Syamsuddin Muir, Lc, MA

Penguji I
Ahmad Adri Rifa'i, M. Ag

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M. Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/5894/2020

Pekanbaru, 28 September 2020

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SEPTI PIYOLA
NIM	: 11724202875
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: PTUN Pekanbaru Jl HR. Soebrantas KM. 9 Kota Pekanbaru Kec. Tampan Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Analisis putusan PTUN pekanbaru no 39/G/2018 tentang pelaksanaan pemberhentian
perangkat desa berdasarkan undang undang nomor 6 tahun 2014 dalam prespektif fiqih
siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan

Dekan UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/5894/2020

Pekanbaru, 28 September 2020

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SEPTI PIYOLA

NIM : 11724202875

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Semester : VII (Tujuh)

Lokasi : PTUN Pekanbaru Jl HR. Soebrantas KM. 9 Kota Pekanbaru
Kec. Tampan Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis putusan PTUN pekanbaru no 39/G/2018 tentang pelaksanaan pemberhentian perangkat desa berdasarkan undang undang nomor 6 tahun 2014 dalam prespektif fiqh siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

Pembusan

Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/35635
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 104/F.II/P.00.9/5894/2020 Tanggal 28 September 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **SEPTI PIYOLA**
2. NIM / KTP : **11724202875**
3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS PUTUSAN PTUN PEKANBARU NO 39/G/2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG; UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : **PTUN PEKANBARU JL. HR. SOEBRANTAS KM. 9 KOTA PEKANBARU KEC. TAMPAN PEROVINSI RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Oktober 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Disembuskan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala PTUN Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 28 September 2020

UIN SUSKA RIAU : 04/F.I/PP.01.1/5895/2020

: Pening

: Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. IRFAN ZULFIKAR, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : SEPTI PIYOLA

NIM : 11724202875

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Analisis putusan ptun pekanbaru no 39/G/2018 tentang pelaksanaan pemberhentian perangkat desa berdasarkan undang undang nomor 6 tahun 2014 dalam prespektif fiqih siyasah"

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

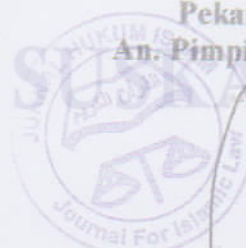
: SEPTI PIYOLA
 : 11724202875
 : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 : ANALISIS PUTUSAN PTUN PEKANBARU NOMOR
 39/G/2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN
 PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
 DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF
 FIQIH SIYASAH

Pembimbing : Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Juni 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Septi Piyola, Lahir di Kototinggi, Kabupaten 50 Kota, Sumatra Barat pada tanggal 10 September 1998. Anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan ayahanda, Afrizal dan Ibu Afniwati. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD negeri 02 Kototinggi, Kabupaten 50 Kota, Sumatra Barat, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 01 Kototinggi, Kabupaten 50 Kota, Sumatra Barat, lulus Tahun 2014. Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kototinggi, dan lulus pada tahun 2017.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“PUTUSAN PTUN PEKANBARU NOMOR 39/G/2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 19 April 2021 jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.56 (*Coum Laude*) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).